Abstrak

Disertasi dengan judul “Rekonstruksi Wali Nikah Berbasis Fikih Resiprositas (Menggali Konsep Rekonstruksi Hak Perwalian terhadap Anak Perspektif Asosiasi Penghulu Republik Indonesia dan Asosiasi Dosen Hukum Keluarga Indonesia)” ini di tulis oleh Moh. Lutfi Ridho dengan Promotor Prof. Dr. H. A. Hasyim Nawawie, SH., M.Si., M.HI., dan Prof. Dr. Iffatin Nur, M.Ag.

Kata Kunci: Rekonstruksi, Wali Nikah, Asosiasi Penghulu Republik Indonesia, Asosiasi Dosen Hukum Keluarga Indonesia.

Dalam perspektif asosiasi penghulu Republik Indonesia, hampir semua kantor urusan agama menghadapi *vis a vis* legal formal hukum perwalian dalam pernikahan dengan legal substantive prinsip keadilan dan resiprositas. Dalam legal formal regulasi perwalian, dinyatakan bahwa yang berhak menjadi wali nikah adalah wali nasab dan wali hakim sebagai alternatifnya. Meski dalam kehidupan senyatanya wali nasab tidak menunaikan kewajiban perwalian, baik materiel maupun immateriel. Sementara itu, orang lain yang mengangkatnya telah menunaikan kewajiban perwalian yang seharusnya menjadi tanggung jawab wali nasab. Begitu juga dengan ibu yang diabaikan suami atau ayah biologis, telah menunaikan sendiri tanggung jawab perwalian yang seharusnya ditunaikan ayah. Baik orang tua angkat maupun ibu justru tidak mendapatkan hak untuk menjadi wali nikah bagi anaknya, meski kewajiban perwalian yang jauh lebih berat telah ditunaikannya dengan tulus, ikhlas bahkan penuh perjuangan. Tidak terwujudnya prinsip keadilan dan resiprositas dalam regulasi perwalian inilah yang menggugah penulis untuk melakukan upaya rekonstruktif kontruksi regulasi perwalian anak perspektif Asosiasi Penghulu Republik Indonesia sebagai praktisi yang menjalankan prosesi pernikahan dan Asosiasi Dosen Hukum Keluarga Islam Indonesia sebagai akademisi yang konsen dalam bidang hukum keluarga Islam termasuk pernikahan dan perwalian.

Pertanyaan penelitian dalam penulisan disertasi ini adalah: 1) Bagaimana konstruksi hak perwalian terhadap anak perspektif Asosiasi Penghulu Republik Indonesia dan Asosiasi Dosen Hukum Keluarga Indonesia?. 2) Bagaimana dekonstruksi hak perwalian terhadap anak perspektif Asosiasi Penghulu Republik Indonesia dan Asosiasi Dosen Hukum Keluarga Indonesia?. 3) Bagaimana konstruksi baru (rekonstruksi) hak perwalian terhadap anak berbasis fikih resiprositas perspektif Asosiasi Penghulu Republik Indonesia dan Asosiasi Dosen Hukum Keluarga Indonesia?.

Tujuan penelitian dalam penulisan disertasi ini adalah: 1) mengelaborasi dan menganalisis konstruksi hak perwalian terhadap anak perspektif Asosiasi Penghulu Republik Indonesia dan Asosiasi Dosen Hukum Keluarga Indonesia. 2) menganalisi dan menemukan dekonstruksi hak perwalian terhadap anak perspektif Asosiasi Penghulu Republik

Indonesia dan Asosiasi Dosen Hukum Keluarga Indonesia. 3) menemukan konstruksi baru (rekonstruksi) hak perwalian terhadap anak berbasis fikih resiprositas perspektif Asosiasi Penghulu Republik Indonesia dan Asosiasi Dosen Hukum Keluarga Indonesia.

Penelitian disertasi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan studi multisitus. Teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam, observasi partisipan, analisis komparatif dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis data situs tunggal maupun multi situs melalui prosedur spiral analisa data Creswell dengan menggunakan penalaran, pemilahan dan kategorisasi induktif sesuai dengan tema. Langkah tehnis dalam meganalisa data juga merujuk pada Atkinson dengan tahapan; *pertama* membuat repositori data menggunakan teori basis data relasional dasar. *Kedua* melibatkan pembuatan kode untuk mengidentifikasi bongkahan data. Kode-kode yang dihasilkan ini kemudian dianalisa dan dirasionalisasi. *Ketiga* melibatkan analisa data studi multi situs dengan menghasilkan berbagai laporan. *Keempat* menghasilkan proposisi akhir dengan menghubungkan kode yang dirasionalisasi kembali ke proposisi awal, di mana proposisi baru yang sesuai dihasilkan. Sementara pengecekan keabsahan data dilakukan dengan *trustwothiness* (kepercayaan), *credibility* (kredibilitas), *confirmatibility* (kepastian) dan *data dependability* (ketergantungan data).

Dari hasil penelitian dalam disertasi ini penulis menyimpulkan sebagai berikut. 1) Konstruksi perwalian anak angkat dalam perspektif APRI dan ADHKI memaknai bahwa esensi dari sebuah wali adalah memenuhi kebutuhan dan menanggung hidup orang yang ada dalam perwaliannya. Rujukan perwalian masih tetap mengacu pada regulasi dalam Undang-undang pernikahan dan kompilasi hukum Islam yang memberikan hak perwalian sebatas wali nasab dan wali hakim dan belum mengakomodir orang tua angkat dan ibu, meski keduanya telah menunaikan kewajiban perwalian yang seharusnya menjadi tanggung jawab wali nasab. 2) Dari sudut pandang APRI dan ADHKI bahwa dekonstruksi dalam konsep perwalian bagi anak angkat oleh orang tua angkat, ibu ataupun mereka yang menjadi pelindung terhadap anak tersebut didasari oleh sebuah pemaknaan kembali teks *syariah* mengenai perwalian yang harus dari jalur nasab dan wali hakim dengan menggunakan pendekatan sosiologis, hak asasi manusia, dan perwujudan akan keadilan *(adalah)* dan resiprositas (prinsip timbal balik dan ketersalingan). 3) Rekonstruksi perwalian anak angkat dalam perspektif APRI dan ADHKI berbasis fikih resiprositas menghasilkan sebuah model kesalingan hak dan kewajiban antara anak dan orang tua serta suami dan istri. Sehingga model rekonstruksi tersebut memberikan kesempatan kepada seorang ibu yang telah mengasuh dan menunaikan kewajiban perwalian anaknya untuk bisa menjadi wali nikah dan ayah angkat yang telah mengasuh dan menunaikan kewajiban perwalian juga berhak menjadi wali nikah.

Abstract

This dissertation titled "The Reconstruction of Custodian of Marriage Based on the Islamic Jurisprudence of Reciprocity (Exploring the Concept of Reconstruction of Custodianship Rights for Children from the Perspective of the Association of Indonesian Marriage Officials and the Association of Indonesian Family Law Lecturers)" was written by Moh. Lutfi Ridho and was co-promoted by Prof. Dr. H. A. Hasyim Nawawie, S.H., M.Si., M.H.I. and Prof.Dr. Iffatin Nur, M.Ag.

Keywords: Reconstruction, Custodian of Marriage, Association of Indonesian Marriage Officials, APRI, Association of Indonesian Family Law Lecturers, ADHKI

In the perspective of the Association of Indonesian Marriage Officials (Asosiasi Penghulu Republik Indonesia or APRI), almost all of the sub-district Religious Affairs Offices (KantorUusan Agama or KUA) in Indonesia face the legal formal law of Custodianship of marriage with substantive legal principles of justice and reciprocity. In the legal formal law of marriage custodianship, it is stated that those who have the right to become a Custodian of marriage are *wali nasab* (the custodian from the family) and *wali hakim* (a Muslim judge custodian) as an alternative. In reality, many *wali nasab* do not fulfil their custodianship obligations either materially or immaterially whereas other people who adopt the bride-to-be(s) have fulfilled such obligation which should otherwise become the responsibility of *wali nasab*. Likewise, a mother who is neglected by her husband or by a bride-to-be's biological fathers has fulfilled the custodianship responsibilities that should otherwise be fulfilled by the father. Both foster parents or mothers do not have the right to be the custodian of marriage for the bride-to-be despite they have fulfilled their much heavier custodianship obligation sincerely and even full of struggle. The failure to realize the principles of justice and reciprocity in the custodianship regulation has inspired the author to do reconstructive efforts in the construction of marriage custodianship regulations for children in the perspective of the Association of Indonesian Marriage Officials as practitioners who carry out marriage processions and the Association of Indonesian Family Law Lecturers (Asosiasi Dosen Hukum Keluarga Indonesia or ADHLI) as academics who are concerned in the field of Islamic family law, including marriage and custodianship.

The problem statements of this dissertation are: 1) How is the construction of custodianship rights for children in the perspective of the Association of Indonesian Marriage Officials and the Association of Indonesian Family Law Lecturers?, 2) How is the deconstruction of custodianship rights for children in the perspective of the Association of Indonesian Marriage Officials and the Association of Indonesian Family Law Lecturers?, and 3) How is the reconstruction of custodianship rights for children in the perspective of the Association of Indonesian Marriage Officials and the Association of Indonesian Family Law Lecturers?

The research objectives of this dissertation are: 1) to elaborate and analyse the construction of custodianship rights for children in the perspective of the Association of Indonesian Marriage Officials and the Association of Indonesian Family Law Lecturers, 2) to analyse and find the deconstruction of custodianship rights for children in the perspective of the Association of Indonesian Marriage Officials and the Association of Indonesian Family Law Lecturers, and 3) to find a reconstruction of custodianship rights for children in the perspective of the Association of Indonesian Marriage Officials and the Association of Indonesian Family Law Lecturers.

This dissertation research uses a qualitative approach with a multi-site study design. Data collection techniques employ in-depth interviews, participant observation, comparative analysis and documentation. The data was then analysed using single or multiple sites through Creswell's data analysis spiral procedures by using reasoning, inductive sorting, and categorization in accordance with the theme. The technical steps in analysing the data also referred to the Atkinson's stages as follows: *first,* creating a data repository using basic relational database theory. *Second* is creating code to identify chunks of data. The resulting codes are then analysed and rationalized. *Third* is analysing multi-site study data by generating multiple reports. *Fourth* is generating the final proposition by linking the rationalized code back to the original proposition in which the corresponding new proposition is generated. Meanwhile, checking the validity of the data was done to see their *trustworthiness*, *credibility*, *conformability,* and *dependability*.

The results of the research in this dissertation, the author concludes that: 1) The construction of Custodianship of adopted children in the perspective of the APRI and the ADHKI means that the essence of a custodian is to meet the needs and support the lives of those in their custodianship. The custodianship still refers to the Indonesian Law on Marriage and the Compilation of Islamic Laws that give custodianship rights only to *wali nasab* and *wali hakim* and have not yet accommodated foster parents and mothers even though both have fulfilled their custodianship obligations which should otherwise be the responsibility of *wali nasab*, 2) from the point of view of the APRI and the ADHKI, the deconstruction of the concept of custodianship for adopted children by foster parents, mothers or those who have fulfilled custodianship obligations of the children is based on a re-interpretation of the *sharia* text regarding custodianship which must be from *wali nasab* and *wali hakim* using a sociological approach, human rights, and the embodiment of justice *(adalah)* and the principle of reciprocity, and 3) the reconstruction of custodianship for adopted children in the perspective of the APRI and the ADHKI based on the Islamic jurisprudence of reciprocity produces a model of the reciprocal rights and obligations between children and parents as well as husband and wife. Thus, such reconstruction model provides an opportunity for a mother who has cared for and fulfilled custodianship obligations to the child to become

her custodian of marriage and, likewise, a foster father who has brought up and fulfilled his custodianship obligations also has the right to become a custodian of marriage for his adopted child.

مستخلص

الأطروحة بعنوان "إعادة بناء ولي النكاح في ضوء عقد التبادل (استكشاف مفهوم إعادة بناء حقوق الولاية لدى الطفل في منظور اتحاد أمراء النكاح و اتحاد محاضرين قانون الأسرة بجمهورية إندونيسيا)" . إعداد محمد. لطفي رضا تحت إشرا الأستاذ د. حشيم نواوي ،الماجستير. و د. عفتين نور ، الماجستير.

الكلمات المفتاحية: إعادة البناء ، ولي النكاح ، اتحاد أمراء النكاح و اتحاد محاضرين قانون الأسرة بجمهورية إندونيسيا

خلفية البحث. وفي منظور اتحاد أمراء النكاح بجمهورية إندونيسيا أن جميع إدارة الشؤون الدينية واجت مشكلة ما بين القانون الرسمي مع قانون ولاية النكاح في نطاق المبادئ القانونية الموضوعية للعدالة والمعاملة في ضوء عقد التبادل. وقد ثبت ذلك حكمارسميا أن من له حق ولي النكاح هو ولي النسب أو ولي الحاكم كمبدل. رغم أن ولي النكاح من جهة النسب في الواقع لا يفي بواجب الولاية سواء كان ماديًا أو غير مادي. وفي نفس الوقت، فإن الشخص الآخر الذي عينه قد أوفى بواجب الولاية الذي يجب أن يكون من مسؤولية ولي النسب مع وجود عقد التبادل. فإن الأمهات اللات أهملهن أزواجهن أو آباؤهن قد أوفوا بمسؤوليات الولاية الخاصة بهم التي يجب أن يؤديها الأب. ولا يحق للوالدين بالتبني ولا للأمهات أن يصبحن ولاية النكاح لأطفالهن ، على الرغم من وفائهم بالتزامات الولاية مع الأثقل مسؤولية لا يقضيها إلا بالخلاص الكفاح. و إن الفشل في تحقيق مبادئ العدالة والمعاملة على عقد التبادل في لائحة الولاية هو ما يهم المؤلف لبذل جهود البحث على إعادة بناء في بناء ولي النكاح لدى الأطفال في منظور اتحاد أمراء النكاح بجمهورية إندونيسيا كالممارسين الذين مارسوا عقد النكاح و اتحاد اتحاد محاضرين قانون الأسرة بجمهورية إندونيسيا كأكاديميين معنيين في مجال قانون الأسرة بما يشمل من النكاح و الولاية.

أسئلة البحث هي: 1) كيف يتم بناء حق الولاية لدى الأطفال في منظور اتحاد أمراء النكاح و اتحاد محاضرين قانون الأسرة بجمهورية إندونيسيا ؟ 2) كيف يتم تفكيك حق الولاية لدى الأطفال في منظور اتحاد أمراء النكاح و اتحاد محاضرين

قانون الأسرة بجمهورية إندونيسيا ؟ 3) ، كيف يتم البناء الجديد (إعادة البناء) لحق الولاية لدى الأطفال في ضوء الفقه المتبادل في منظور اتحاد أمراء النكاح و اتحاد محاضرين قانون الأسرة بجمهورية إندونيسيا ؟

أهداف البحث من هذه الأطروحة هي: 1) لتوضيح وتحليل بناء حق الولاية لدى الأطفال في منظور اتحاد أمراء النكاح و اتحاد محاضرين قانون الأسرة بجمهورية إندونيسيا. 2) لتحليل وإيجاد تفكيك حق الولاية لدى الأطفال في منظور اتحاد أمراء النكاح و اتحاد محاضرين قانون الأسرة بجمهورية إندونيسيا. 3) ، إيجاد بناء جديد (إعادة بناء) لحق الولاية لدى الأطفال على عقد التبادل في منظور في منظور اتحاد أمراء النكاح و اتحاد محاضرين قانون الأسرة بجمهورية إندونيسيا.

منهجية البحث. استخدمت هذه الأطروحة منهجًا نوعيًا مع تصميم البحث دراسة متعدد المواقع. وأما تقنيات جمع البيانات مع المقابلات المتعمقة ، والمراقبة بالمشاركة، والتحليل المقارن والتوثيق. واستخدم تحليل البيانات دراسة موقع واحد و كذلك متعدد المواقع من خلال إجراءات حلزونية لتحليل بيانات Creswell باستخدام الاستدلال والفرز والتصنيف الاستقرائي وفقًا مع موضوع البحث. وأشارت الخطوات الفنيةإلى تحليل البيانات أيضًا إلى مراحل Atkinson ؛ وهي أولاً، بإنشاء مستودع بيانات باستخدام نظرية قاعدة البيانات العلائقية الأساسية. ثانيا، إنشاء مستودع لتحديد أجزاء البيانات مع تحليل الرموز الناتجة وترشيدها. ثالثا، تحليل البيانات نحو دراسة متعددة المواقع من خلال إنشاء تقارير متعددة. رابعا، الاقتراح النهائي عن طريق ربط المستودع العقلاني بالمقترح الأصلي ، حيث يتم إنشاء الاقتراح الجديد المقابل. بينما يتم التحقق من صحة البيانات بمصداقية (ثقة) ومصداقية (مصداقية) وتأكيد (يقين) والاعتماد على البيانات (اعتماد على البيانات)

نتائج البحث: 1) بناء ولاية النكاح لدى الأطفال بالتبني في منظور اتحاد أمراء النكاح و اتحاد محاضرين قانون الأسرة بجمهورية إندونيسيا هو أن حقيقة الولاية تلبية الاحتياجات ودعم حياة من لديه حق الولاية في حياته. الولاية لا تزال الإشارة إليها قد أشارت إلى اللوائح الواردة في قانون النكاح وتجميع القوانين الإسلامية التي تمنح حقوق الولاية إلى حدها على القضاة ولم تستوعب الآباء والأمهات بالتبني ، على الرغم

من أن كلاهما أوفى بالتزامات الولاية الخاصة بهما. يجب أن يكون من مسؤولية ولي النسب. 2) من وجهة نظر في منظور اتحاد أمراء النكاح و اتحاد محاضرين قانون الأسرة بجمهورية إندونيسيا أن التفكيك في مفهوم الولاية لدى الأطفال بالتبني من قبل الوالدين بالتبني أو الأمهات أو أولئك الذين يقومون بحماية الطفل يقوم على إعادة تفسير نص الشريعة فيما يتعلق بالوصاية التي يجب أن يكون من سلالة ووصي القضاة باستخدام منهج اجتماعي، وحقوق الإنسان ، وتجسيد للعدالة مع عقد التبادل. 3) إعادة بناء الولاية لدى الطفل بالتبني من منظور في منظور اتحاد أمراء النكاح و اتحاد محاضرين قانون الأسرة بجمهورية إندونيسيا مع عقد التبادل ينتج نموذجًا للانزعاج من الحقوق والواجبات بين الأطفال والآباء وكذلك الزوج والزوجة. بحيث يوفر نموذج إعادة البناء فرصة للأم التي رعت وأوفت بالتزامات الوصاية على طفلها لتصبح ولاية النكاح، كما يحق للأب بالتبني الذي اعتنى بالولاية والوفاء بالتزامها أن يصبح وليا للنكاح.